

**PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA PADANG**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH :**  
**FIRMAN IKHLAS**  
**2010012111302**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg No: 23/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

# PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG

Firman Ikhlas<sup>1</sup>, Nurbeti. S.H.,M.Hum.<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-Mail : [firmanikhlas2002@gmail.com](mailto:firmanikhlas2002@gmail.com)

## ABSTRACT

*Padang City is the capital of West Sumatra Province, has a lot of tourism potential that has not been exploited optimally. Tourism as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning Tourism in Article 1 number 3, one of the objectives of tourism is to improve welfare and economic growth. Tourism in Padang City is under the management of the Tourism Department. Problem Formulation, 1) How is the implementation of the duties and functions of the Tourism Department in increasing Padang City's Original Regional Income from the tourism sector? 2) What are the obstacles faced by the Tourism Department in increasing Padang City's Original Regional Income from the tourism sector? 3) What are the efforts made by the Tourism Department to increase the Regional Original Income of Padang City from the tourism sector? To answer the problem above, the research method used is Sociological Law. Data collection techniques using interviews and document study. Data analysis using qualitative descriptive analysis. The results of the research and discussion of the problems studied are 1) That in principle there are several things that are still experiencing obstacles. 2) The obstacles faced by the Tourism Department in increasing the Regional Original Income of Padang City from the tourism sector are that there has been no improvement in facilities and infrastructure. 3) The efforts made by the Tourism Department in increasing the Regional Original Income of Padang City from the tourism sector are completing the facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Tourism, Padang, PAD*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pasar modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belana daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas atau yang disebut juga subsidi

Semua jenis pendapatan asli daerah tersebut merupakan sumber penerimaan yang murni bagi daerah, artinya pendapatan tersebut berasal dari potensi daerahnya sendiri sehingga wajar dan selayaknya apabila peran pendapatan asli daerah dalam keuangan merupakan salah satu tolak ukur

dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dalam pembangunan nasional, pariwisata merupakan salah satu bidang yang banyak memberikan sumbangan devisa Negara selain dari sektor minyak dan gas berperan dalam perluasaan lapangan kerja, mendorong serta pemeratakan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan pariwisata perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai suatu daerah mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam pencapaian tingkat kemakmuran. Semakin tinggi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang telah dimiliki.

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 1 angka 3 pengertian Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai bagian untuk memperbaiki tingkat hidup yang berkeadilan sosial menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Kegiatan pembangunan juga dilaksanakan diberbagai sektor termasuk diantaranya sektor pariwisata ditingkat daerah yang memperhatikan potensi dan prioritas tiap-tiap daerah.

Pengembangan pariwisata memerlukan peran dan kontribusi dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran dan kontribusi menurut kapasitasnya masing-masing. Salah satu aspek penting dan mendasar bagi keberhasilan pengembangan pariwisata adalah dapat diciptakannya iklim kondusif bagi berkebangannya kepariwisataan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul : **"PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG"**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari sektor wisata?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari sektor wisata?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari sektor wisata?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari sektor wisata.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari sektor wisata.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari sektor wisata.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis/empiris, Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, berdasarkan bahan dan data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer disusun dengan menggunakan metode kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Dari Sektor Wisata**

Dalam melaksanakan tugas dan pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab langsung

kepada WaliKota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata mempunyai tugas berdasarkan peraturan WaliKota Padang No 39 Tahun 2022:

1. Pengembangan Destinasi Wisata
2. Promosi Pariwisata
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Pengaturan dan Penataan
5. Pembangunan Kerjasama
6. Pengawasan dan Evaluasi
7. Penyusunan Kebijakan

Fungsi Dinas Pariwisata yaitu:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Pariwisata
  - Perencanaan dan Pengembangan
  - Peningkatan Kualitas Pelayanan
  - Koordinasi Antar Stakeholder
  - Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata
  - Penyusunan Rencana Aksi
  - Koordinasi Lintas Sektor
  - Penegakan Regulasi
  - Pelibatan Masyarakat
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata
  - Tujuan Evaluasi
  - Analisis Hasil
  - Pelaporan
  - Tindak Lanjut
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Bidang Pariwisata
  - Perencanaan Pengorganisasian
  - Penganggaran
  - Pelayanan Publik
  - Pelaporan Dan Akuntabilitas
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh WaliKota Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya
  - Pengembangan Destinasi Wisata Lokal
  - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  - Pelestarian Lingkungan dan Budaya
  - Evaluasi dan Pelaporan Berkala.

Dinas Pariwisata merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dalam pemerintahan Kota

Padang dengan peran yang disandanginya sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah khususnya di bidang pariwisata Kota Padang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Kota Padang memiliki peranan yang sangat besar terutama dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kota Padang.

Dinas Pariwisata Kota Padang perlu untuk menyusun suatu acuan kegiatan yang berbentuk Rencana dan Program Kerja yang sesuai dengan berbagai kondisi, fleksibel, dengan berbagai perubahan dan dapat diterapkan (*applicable*) oleh para pelaku pariwisata (Pemerintah, swasta dan masyarakat) dan tentunya untuk kepentingan pengembangan “paket wisata” ini. Upaya pengembangan Kepariwisataaan memerlukan adanya rencana strategis dan program-program yang mampu mendukung terhadap permasalahan penyelesaian, serta tanggap terhadap isu-isu yang berkembang.

## **B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Dari Sektor Wisata**

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpa dengan macam kebudayaan, adat, serta agama tidak terkecuali di Kota Padang, yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian. Di dalam mengembangkan pariwisata di Kota Padang dengan tujuan meningkatkan PAD Kota Padang dan mensejahterakan kehidupan masyarakat banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata yakni:

- a. Belum adanya pengadaan sarana dan prasarana, seperti permainan banana boat dan wahana bermain anak seperti yang terdapat di pantai-pantai seperti yang ada di Bali, khususnya untuk Pantai Air Manis. Jika hal tersebut diadakan, maka pengunjung atau wisatawan

akan lebih tertarik untuk datang berpariwisata ke Kota Padang.

- b. Di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang masih ada beberapa daerah dan pantai masih dikuasai oleh masyarakat, jadi kalau Dinas Pariwisata memungut retribusi disana, tentu hal yang paling utama harus diselesaikan yaitu permasalahan lahan yang mana oleh masyarakat dianggap sebagai tanah ulayat dan bagaimana cara mengatur kerjasamanya.
- c. Adanya situasi yang tak terduga, seperti pandemi, bencana alam, atau isu keamanan yang dapat mempengaruhi kinerja sektor pariwisata.

### **C. Upaya-upaya Yang Dilakukan Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Sektor Wisata**

Untuk dapat mengembangkan pariwisata di Kota Padang dengan tujuan meningkatkan PAD Kota Padang dan mensejahterakan kehidupan masyarakat banyak upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata yakni:

- a. Dengan mendukung program Walikota Padang saat ini, yang menginginkan Kota Padang yang bersih dan maksiat, maka Dinas Pariwisata mempunyai Program pariwisata yang barokah islamiah. Program ini ditujukan untuk tempat-tempat wisata yang rentan akan perbuatan maksiat, Dinas Pariwisata sekali seminggu rutin melakukan pengawasan terhadap potensi maksiat di tempat wisata.
- b. Mendorong inovasi dan kreativitas pengelolaan objek wisata oleh masyarakat.
- c. Dengan melengkapi wahana bermain di setiap tempat wisata seperti yang ada di daerah lain yang sudah maju,

contohnya, boat, banana boat dan sebagainya.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari sektor wisata sudah baik untuk meningkatkan kunjungan wisata di objek wisata serta mempromosikan objek wisata dengan melakukan promosi wisata keluar daerah melalui internet, bekerja sama dengan biro-biro perjalanan serta melibatkan pelaku pariwisata di tempat lain.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari sektor wisata yaitu
  - a. Belum adanya pengadaan sarana dan prasarana, seperti permainan banana boat dan wahana bermain anak seperti yang terdapat di pantai-pantai yang ada di Bali.
  - b. Di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang masih ada beberapa daerah dan pantai masih dikuasai oleh masyarakat.
  - c. Adanya situasi yang tak terduga seperti pandemi, bencana alam atau isu keamanan yang dapat mempengaruhi kinerja sektor wisata.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Padang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari sektor wisata yaitu:
  - a. Dengan mendukung program Walikota Padang saat ini, yang menginginkan Kota Padang yang bersih dan maksiat, Dinas Pariwisata sekali seminggu rutin melakukan pengawasan terhadap potensi maksiat di tempat wisata.
  - b. Mendorong inovasi dan kreativitas pengelolaan objek wisata oleh masyarakat.
  - c. Dengan melengkapi wahana bermain di setiap tempat seperti

yang ada di daerah lain yang sudah maju, contohnya, boat, banana boat dan sebagainya.

#### **B. Saran**

1. Peningkatan pemanfaatan potensi-potensi daerah harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pariwisata Kota Padang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
2. Agar Dinas Pariwisata Kota Padang mencari solusi terhadap persoalan, untuk memajukan Pariwisata Kota Padang sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan mensejahterakan masyarakat Kota Padang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-Buku**

Abdul Halim. 2004. Bunga Rampai: *Manajemen Keuangan Daerah*. AMP YKP. Yogyakarta.

Hadinoto kusudianto, 1996. *Perencanaan pengembangan destinasi pariwisata*. Jakarta. UI Press

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata,

##### **C. Sumber Lainnya**

Rencana Strategis Kota Padang Tahun 2019-2024.

<https://padek.jawapos.com/padang/2363757591/realisasi-pad-kota-padang-tertinggi-sejak-5-tahun-terakhir>

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih kepada para pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HTN Periode 2021-2024, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
4. Ketua Bagian HTN Periode 2025-2029, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
5. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
6. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.